



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2397-2409

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Rekonstruksi Militer Jepang Pasca Perang Dunia II: Japan Self Defense Force dan Perannya dalam Pertahanan dan Keamanan Jepang

Muhammad Dzulfiqar Faza Imaduddin^{1✉}, Rizerius Eko Hadisancoko², Erry Herman³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: dzulfiqarimad@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Japan Self-Defense Force atau JSDF adalah pasukan bela diri Jepang yang terbentuk setelah pelarangan adanya tantara nasional bagi negara Jepang sebagaimana tertuang pada Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang membatasi kemampuan militer Jepang dan penggunaan kekuatan dalam urusan internasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya tugas-tugas JSDF, termasuk operasi bantuan bencana, misi pemeliharaan perdamaian internasional, perlindungan sipil, dan pertahanan nasional, dalam menjaga keamanan dan stabilitas Jepang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengandalkan sumber data sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi yang relevan. Selain itu, penelitian ini menekankan komitmen JSDF terhadap pertahanan nasional dan tantangan yang dihadapinya, termasuk keterbatasan konstitusional, kendala keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi di ranah militer. Penelitian ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh Pasukan Bela Diri Jepang dalam melindungi keamanan Jepang dan berkontribusi terhadap perdamaian internasional. Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh JSDF, para pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, memastikan pasukan pertahanan yang tangguh dan efektif yang mampu menjaga kepentingan Jepang dan mempromosikan stabilitas global.

Kata Kunci: *JSDF, Pasal 9, NDPG, Konstitusi Jepang*

Abstract

The Japan Self-Defense Force or JSDF is a Japanese self-defense force formed after the ban on the existence of a national army for the Japanese state as stated in Article 9 of the Japanese Constitution, which limits Japan's military capabilities and the use of force in international affairs. This research highlights the importance of the JSDF's tasks, including disaster relief operations, international peacekeeping missions, civil protection, and national defense, in maintaining Japan's security and stability. This study uses a qualitative descriptive research methodology, relying on secondary data sources such as books, scientific articles, and relevant references. In addition, this research emphasizes the JSDF's commitment to national defense and the challenges it faces, including constitutional limitations, financial constraints, human resource management, and technological advances in the military domain. This research highlights the important role played by the Japan Self Defense Forces in protecting Japan's security and contributing to international peace. By understanding and addressing the challenges faced by the JSDF, policy makers can formulate strategies to overcome these obstacles, ensuring a formidable and effective defense force capable of safeguarding Japan's interests and promoting global stability.

Keyword: *JSDF, Article 9, NDPG, Constitution of Japan*

PENDAHULUAN

Setelah Perang Dunia II, Jepang setuju untuk menerima Konstitusi Pasal 9 tahun 1947 yang menetapkan bahwa Jepang adalah negara yang mencintai perdamaian. Pasal tersebut menyatakan bahwa Jepang dilarang menggunakan perang sebagai instrumen dalam politik luar negeri, serta melarang Jepang memiliki angkatan bersenjata atau tentara nasional. Pada tahun 1951, Jepang menandatangani aliansi keamanan dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Perjanjian Kerjasama dan Keamanan Timbal Balik Amerika Serikat-Jepang (The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security). Perjanjian tersebut mulai berlaku pada bulan April 1952 (Ruriko, 2007).

Sebagian besar isi Konstitusi Jepang tahun 1947 diperoleh melalui kolaborasi antara Amerika Serikat dan Jenderal Douglas MacArthur sebagai pengarahnya. Perubahan ini mengubah sistem pemerintahan Jepang yang sebelumnya otoriter dengan monarki absolut menjadi sebuah bentuk demokrasi liberal dengan sistem politik berbasis parlementer. Konstitusi tersebut memberikan jaminan terhadap hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Peranan Kaisar pun berubah menjadi status simbolis sebagai "Simbol Negara dan Persatuan Rakyat." Salah satu tambahan penting yang dibawa oleh Douglas MacArthur adalah Pasal 9, yang menyatakan bahwa Jepang secara abadi menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional, serta menegaskan bahwa Jepang tidak akan pernah lagi mempertahankan "angkatan darat, laut, atau udara atau potensi perang lainnya" (Lendon, 2016).

Perjanjian Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang, yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951, memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan pangkalan militer di Jepang, tetapi pada perjanjian tersebut tidak

mewajibkan pasukan Amerika Serikat untuk memberikan pertahanan langsung kepada Jepang dalam situasi Jepang diserang. Namun, karena protes sayap kiri di Jepang tetap menjadi perhatian utama para pemimpin Jepang dan Amerika, perjanjian itu secara eksplisit mengizinkan pasukan militer AS yang berbasis di Jepang "untuk memadamkan kerusuhan dan gangguan internal berskala besar di Jepang." Pada pertengahan tahun 1952, Polisi Nasional Jepang diperluas dan diberi nama baru sebagai "National Safety Forces" (Kowalski, 2014).

Pemerintah Jepang memulai proses yang panjang dan berkelanjutan untuk secara bertahap menafsirkan kembali Pasal 9 Konstitusi Jepang untuk memungkinkan kemampuan militer yang lebih besar. Penafsiran ulang Pasal 9 ini membuka jalan bagi pembentukan National Safety Forces menjadi "Pasukan Bela Diri" atau yang dikenal sebagai Japan Self-Defense Force.

The Japan Self-Defense Forces (JSDF), atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai 自衛隊 (Jieitai) adalah pasukan militer terpadu de facto Jepang. Didirikan pada tahun 1954, JSDF terdiri dari Japan Ground Self-Defense Force/JGSDF (陸上自衛隊 - Rikujō Jieitai), Japan Maritime Self-Defense Force/JMSDF (海上自衛隊 - Kaijō Jieitai), dan Japan Air Self-Defense Force/JASDF (航空自衛隊 - Kōkū Jieitai). JSDF diatur oleh Kementerian Pertahanan dengan Perdana Menteri sebagai panglima tertinggi (Kowalski, 2014).

JSDF juga terus meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi ancaman militer potensial. Mereka melakukan latihan militer rutin, meningkatkan kemampuan pertahanan udara dan pertahanan rudal, serta mengembangkan kapabilitas pertahanan siber. Tujuan utama mereka adalah menjaga kesiapan dalam menghadapi ancaman regional dan memastikan pertahanan Jepang dapat bertahan di tengah perubahan keamanan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu Japan Self-Defense Force dan perannya dalam pertahanan dan keamanan Jepang. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang relevan dari buku-buku, artikel ilmiah, dan referensi terkait yang sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada. Metode penelitian ini melibatkan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan tepat sesuai dengan fakta yang ada.

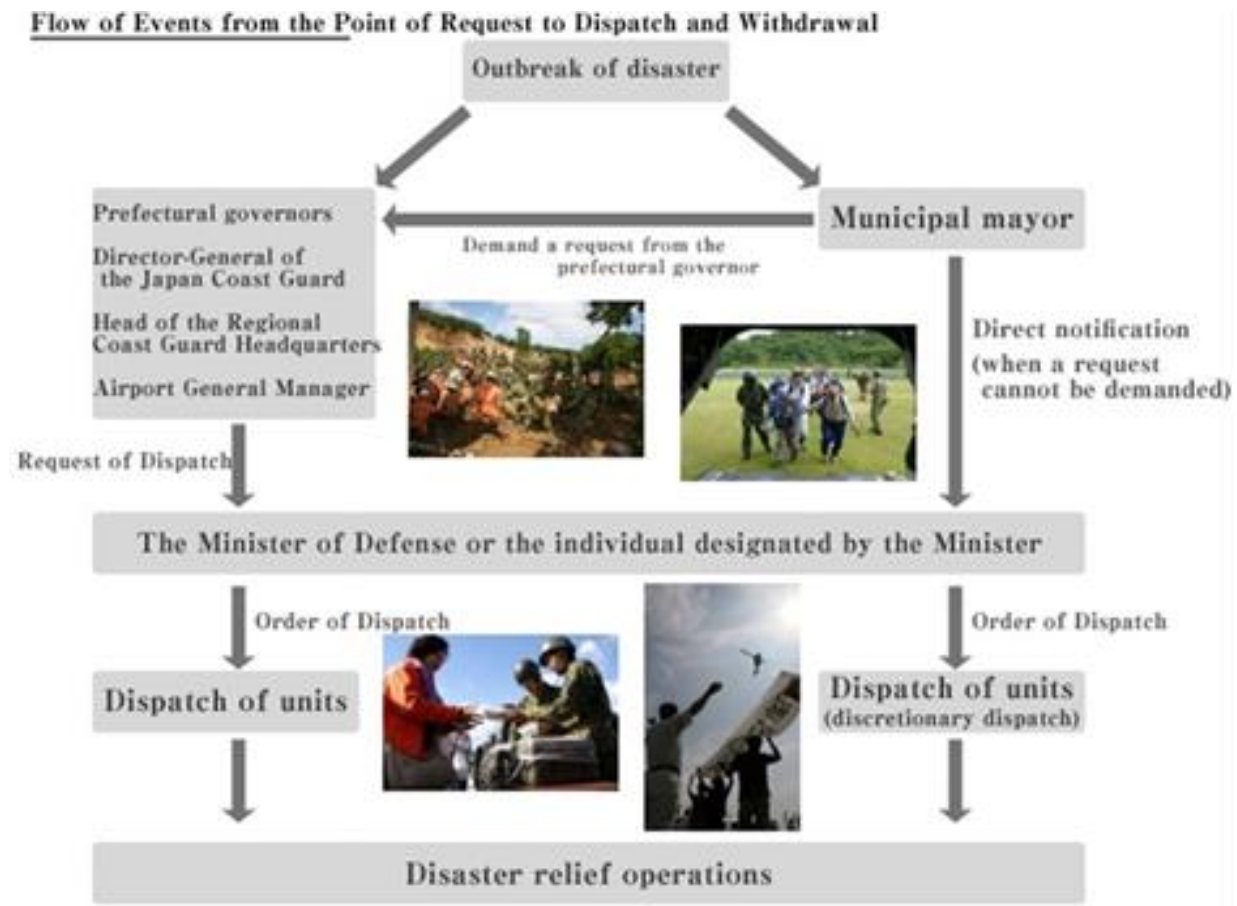
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Utama Japan Self-Defense Force

Japan Self-Defense Force memiliki beberapa tugas utama, yaitu operasi bantuan bencana, operasi kerja sama perdamaian internasional, perlindungan sipil, dan pertahanan negara.

Tugas Operasi Bantuan Bencana

JSDF berkontribusi pada perlindungan jiwa dan harta benda Jepang dengan melakukan operasi bantuan bencana, seperti operasi penyelamatan atau penyelamatan jiwa sebagai akibat dari kecelakaan berskala besar atau bencana alam dalam negeri, termasuk gempa bumi, badai, dan kerusakan akibat banjir, letusan gunung berapi, atau bencana yang berhubungan dengan salju.



Gambar 1. Alur Peristiwa Bencana Hingga Pengiriman dan Penarikan

Sumber: (www.mod.go.jp)

JSDF terlibat dalam berbagai kegiatan yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan, memberikan bantuan kepada kapal dan pesawat yang menghadapi kesulitan, mengendalikan banjir, memberikan perawatan medis, mencegah epidemi, menyediakan pasokan air, serta melakukan transportasi personel dan pasokan. Selain itu, JSDF juga menggunakan pesawat organik untuk melakukan evakuasi medis darurat bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau terpencil yang memiliki sedikit fasilitas medis.

Menteri Pertahanan memiliki kewenangan untuk mengirim JSDF ketika dianggap diperlukan untuk melindungi nyawa atau harta benda dalam situasi bencana alam dan bencana lainnya. Dalam operasi semacam ini, JSDF melaksanakan berbagai tindakan seperti pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan, memberikan bantuan kepada

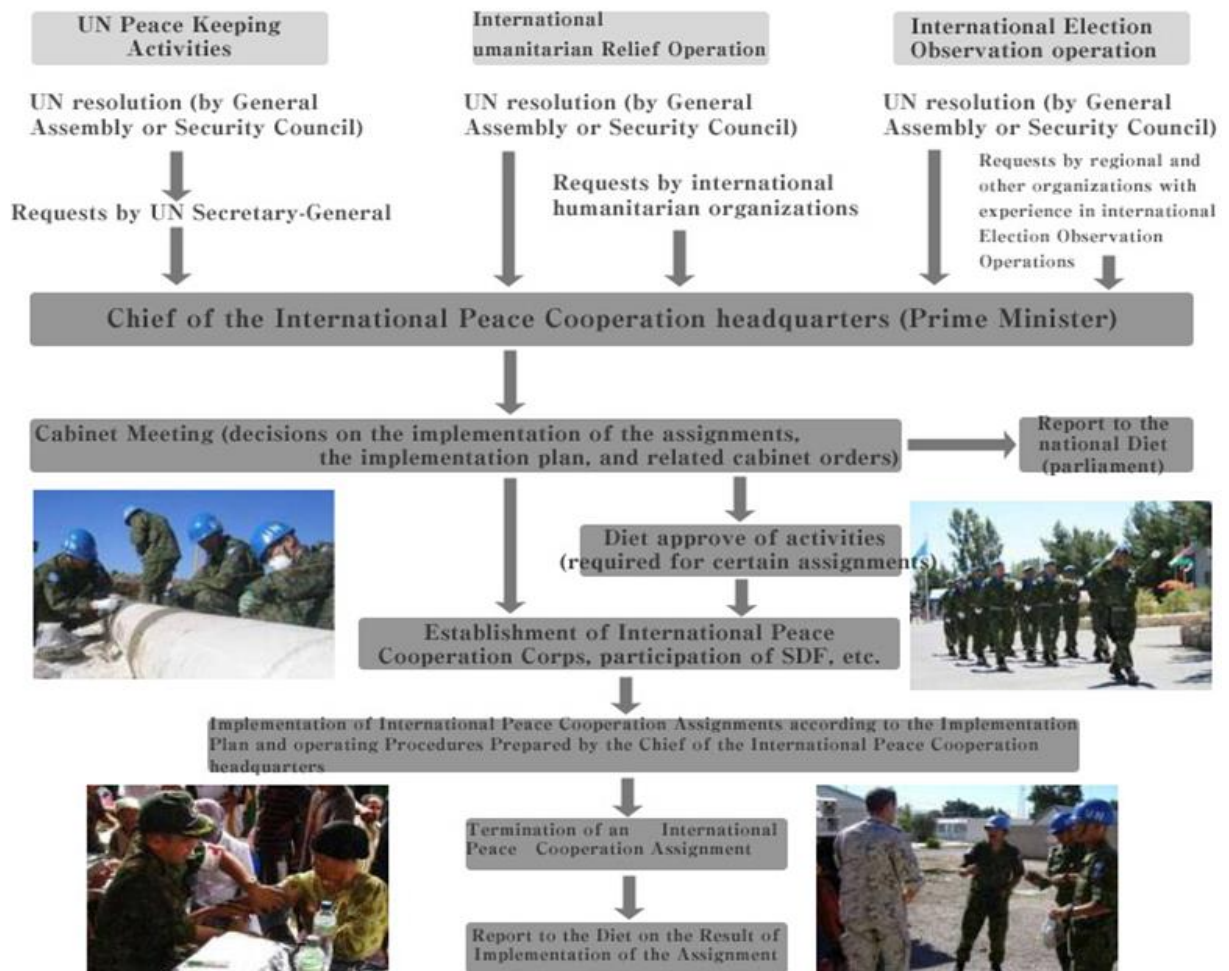
kapal dan pesawat yang menghadapi kesulitan, mengendalikan banjir, memberikan perawatan medis, mencegah epidemi, menyediakan pasokan air, serta melakukan transportasi personel atau pasokan yang diperlukan. Beberapa operasi bencana yang pernah dilakukan oleh JSDF antara lain:

1. Operasi bantuan bencana untuk Gempa Bumi Besar Jepang Timur
2. Operasi bantuan bencana untuk wabah penyakit mulut dan kuku di Prefektur Miyazaki
3. Gempa bumi pedalaman Iwate, Miyagi
4. Operasi bantuan bencana untuk gempa bumi Niigata Chuetsu
5. Operasi bantuan bencana untuk hujan lebat di Kagoshima
6. Operasi bantuan bencana dengan dukungan pasokan air di kota Kure dan Edajima di prefektur Hiroshima
7. Operasi bantuan bencana untuk gempa bumi Niigata Chuetsu
8. Operasi bantuan bencana untuk letusan gunung berapi Miyakejima
9. Operasi bantuan bencana untuk kecelakaan laut dan tumpahan minyak oleh Nakhodka
10. Operasi bantuan bencana untuk serangan gas Sarin di kereta bawah tanah Tokyo
11. Operasi bantuan bencana untuk gempa bumi besar Hanshin Awaji
12. Operasi bantuan bencana untuk letusan gunung berapi Gunung Unzen Fugen

Operasi Kerja Sama Perdamaian Internasional

Untuk berkontribusi pada upaya perdamaian dunia dan promosi kerja sama internasional, JSDF telah secara proaktif melakukan operasi kerja sama perdamaian global, bantuan kemanusiaan untuk bencana berskala besar, dan kegiatan dukungan rekonstruksi.

International Peace Cooperation Operation Flow Chart of International Peace



Gambar 2. Alur Operasi Perdamaian Internasional JSDF

Sumber: (www.mod.go.jp)

Beberapa kegiatan operasi perdamaian internasional yang pernah dilakukan oleh JSDF antara lain:

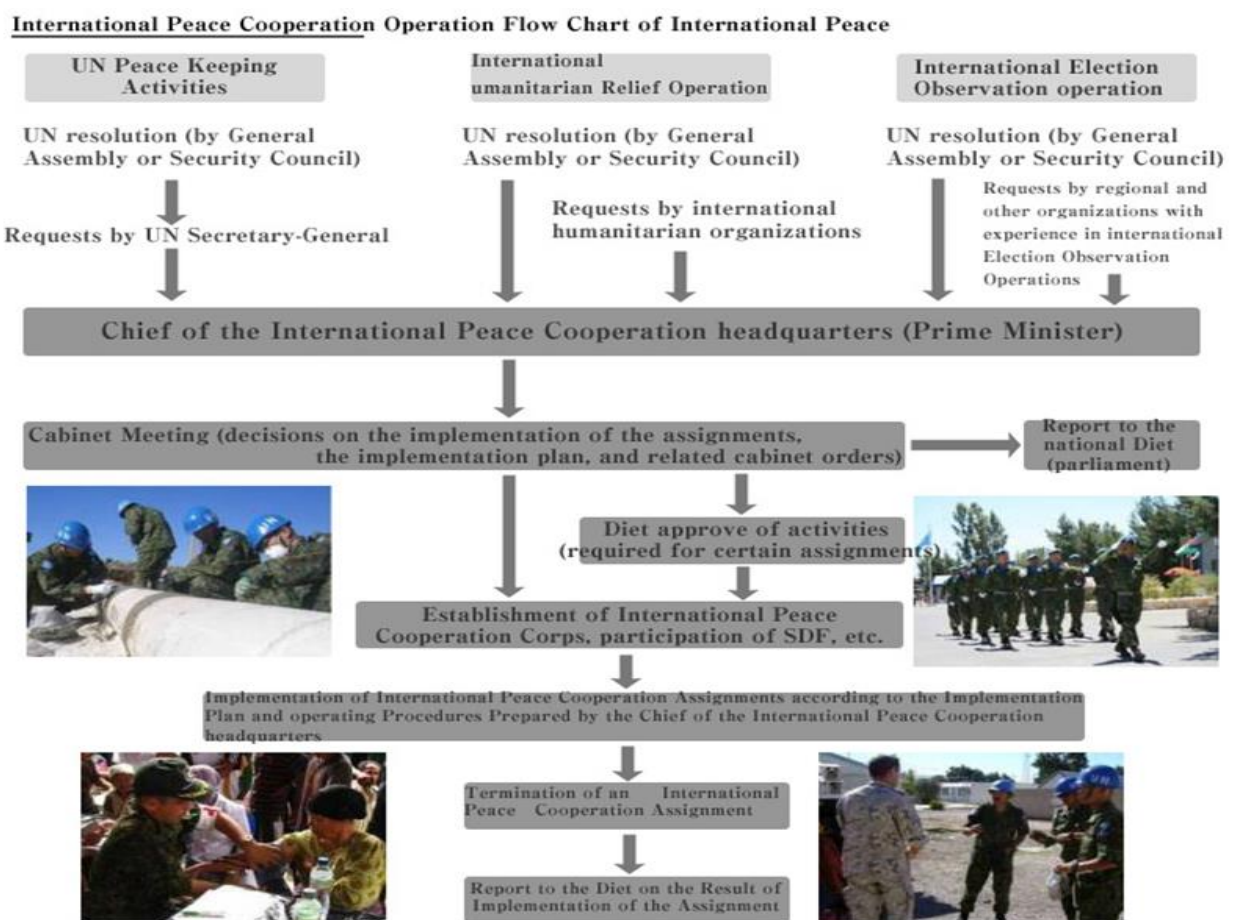
1. Perbaikan jalan di Kamboja
2. Operasi Pengendalian Gerakan di Mozambik
3. Pembersihan salju di jalur patroli di Dataran Tinggi Golan
4. Perbaikan dan pemeliharaan jembatan di Timor Lorosa'e
5. Kegiatan Pemantau Militer di Nepal
6. Kegiatan sebagai perwira staf di markas besar
7. Foto kegiatan Tim Bantuan Bencana
8. Perawatan Medis dan Dukungan Pencegahan Epidemik di Honduras
9. Kegiatan Bantuan Darurat Bencana Internasional untuk dukungan pengiriman bahan bantuan di India
10. Dukungan untuk pencegahan wabah penyakit di Pulau Sumatra, Indonesia
11. Transportasi udara darurat untuk pasien di Pakistan

12. Perawatan medis di Pulau Jawa, Indonesia

13. Dukungan medis di Padang, Indonesia

Perlindungan Sipil

Semua organisasi dan fungsi pemerintah akan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan sipil dalam situasi serangan bersenjata berdasarkan pedoman dasar perlindungan sipil. Pedoman tersebut mencakup langkah-langkah yang akan dilaksanakan dengan kekuatan penuh oleh JSDF untuk menghentikan serangan bersenjata, yang merupakan misi utama JSDF. Selain itu, Rencana tersebut menggambarkan langkah-langkah perlindungan sipil yang akan dilaksanakan dalam jangkauan yang memungkinkan, yang berkaitan dengan evakuasi, dukungan bantuan, dan tanggapan terhadap bencana serangan bersenjata.



Gambar 3. Mekanisme Perlindungan Sipil

Sumber: (www.mod.go.jp)

Pada situasi di mana pengiriman bantuan diperlukan, Menteri Pertahanan akan mengeluarkan perintah pengiriman perlindungan sipil untuk mengirim unit-unit yang relevan untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan sipil.

Pertahanan Negara

Sejak tahun fiskal 1958, Jepang telah secara progresif meningkatkan kemampuan pertahanannya berdasarkan empat rencana pengembangan kekuatan pertahanan. Pada bulan Oktober 1976, Dewan Pertahanan Nasional dan Kabinet memutuskan NDPG (National Defense Program Guidelines) pertama (NDPG untuk Fiskal 1977 dan seterusnya) untuk memperjelas tingkat kapasitas pertahanan yang harus dimiliki Jepang dan untuk memberikan pedoman bagi pengembangan kemampuan pertahanan Jepang. Selanjutnya, Dewan Keamanan dan Kabinet memutuskan NDPG untuk Fiskal 1996 dan Setelahnya pada bulan November 1995 sebagai tanggapan atas perubahan besar dalam situasi internasional, termasuk berakhirnya Perang Dingin, dan meningkatnya ekspektasi terhadap JSDF dan kegiatan internasionalnya; NDPG untuk Fiskal 2005 dan Setelahnya pada bulan Desember 2004 sebagai tanggapan atas munculnya isu-isu umum bagi masyarakat internasional, seperti terorisme internasional dan proliferasi senjata pemusnah massal serta rudal balistik; dan NDPG untuk Fiskal 2011 dan Setelahnya pada bulan Desember 2010.

Sejak tahun fiskal 1986, Jepang telah mengembangkan, memelihara, dan mengoperasikan kemampuan pertahanannya sesuai dengan Program Pertahanan Jangka Menengah (Medium Term Defense Program - MTDP), sebuah rencana lima tahun yang diformulasikan berdasarkan NDPG yang menunjukkan jumlah total pengeluaran untuk jangka waktu tersebut dan jumlah peralatan utama yang akan dibeli. Pada bulan Desember 2013, Dewan Keamanan Nasional dan Kabinet menyetujui Strategi Keamanan Nasional yang pertama, NDPG untuk Fiskal 2014 dan Selanjutnya, dan MTPD untuk Fiskal 2014 hingga Fiskal 2018.

NDPG 2018 yang dirumuskan pada tanggal 18 Desember 2018 menyatakan bahwa Jepang selanjutnya akan membangun kemampuan pertahanan yang benar-benar efektif, yaitu "Pasukan Pertahanan Multi-Domain," yang mana dapat melaksanakan operasi lintas domain, yang secara organik memadukan kemampuan di semua domain termasuk luar angkasa, siber, dan spektrum elektromagnetik. Diharapkan juga mampu melaksanakan kegiatan yang fleksibel dan strategis secara berkelanjutan dalam semua fase mulai dari masa damai hingga kontinjensi bersenjata, dan mampu meningkatkan kemampuan Aliansi Jepang-Amerika Serikat, serta mendorong kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Tantangan yang Dihadapi JSDF

Isu Konstitusional

Pasal 9 Konstitusi Jepang telah menjadi subjek kontroversi dan perdebatan sejak awal. Pasal ini secara historis membatasi peran militer Jepang dan melarang negara ini memiliki potensi perang atau menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik internasional. Pasal 9 menyatakan bahwa rakyat Jepang memiliki cita-cita untuk

menciptakan perdamaian internasional yang didasarkan pada keadilan dan ketertiban. Oleh karena itu, mereka secara permanen menolak perang sebagai hak kedaulatan negara dan menolak ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Untuk mencapai tujuan yang disebutkan sebelumnya, Jepang menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertahankan angkatan darat, laut, udara, atau potensi perang lainnya. Hak untuk berperang sebagai negara tidak akan diakui (Mardialina, 2013).

Dalam beberapa tahun terakhir, ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai revisi atau penafsiran ulang Pasal 9. Beberapa pihak berpendapat bahwa konstitusi harus direvisi untuk memungkinkan Jepang memiliki militer yang lebih kuat dan memainkan peran yang lebih aktif dalam keamanan regional dan internasional. Mereka berpendapat bahwa menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks, Jepang membutuhkan kemampuan pertahanan yang lebih kuat dan lebih fleksibel. Namun, ada juga pendukung setia yang mengadvokasi pelestarian Pasal 9 dan interpretasinya saat ini. Mereka berpendapat bahwa Pasal 9 merupakan simbol penting dari komitmen Jepang terhadap perdamaian dan netralitas militer. Mereka khawatir bahwa merevisi atau menafsirkan ulang Pasal 9 dapat membuka pintu bagi keterlibatan militer Jepang dalam konflik internasional dan meningkatkan ketegangan regional (Mardialina, 2013).

Dalam hal peran JSDF, interpretasi Pasal 9 saat ini membatasi kemampuan JSDF untuk terlibat dalam operasi militer ofensif atau intervensi langsung di luar Jepang. Namun, reinterpretasi dilakukan pada tahun 2014 yang memungkinkan JSDF untuk berkontribusi pada pertahanan diri kolektif dengan sekutu dan berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Penafsiran ulang ini memungkinkan JSDF untuk memberikan dukungan kepada sekutu dan negara sahabat jika Jepang sendiri berada di bawah ancaman (Mardialina, 2013).

Dampaknya adalah bahwa meskipun masih ada batasan signifikan pada peran JSDF, reinterpretasi ini telah memungkinkan JSDF untuk berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, meningkatkan kerja sama militer dengan sekutu seperti Amerika Serikat, dan meningkatkan kesiapan pertahanan Jepang dalam menghadapi ancaman regional (Mardialina, 2013).

Opini Publik

Sudah menjadi hal yang umum untuk mengabaikan pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri Jepang. Berbeda dengan perdebatan di Amerika antara kaum elitis dan pluralis, di Jepang pandangan kaum elitis lebih mendominasi. "Opini publik sering diklaim memiliki pengaruh yang kecil terhadap kebijakan luar negeri Jepang, dan opini publik sering dilihat sebagai bentuk tunduk pada petinggi." Menurut seorang pengamat kebijakan pertahanan Jepang, opini publik Jepang "cenderung mengikuti jalannya peristiwa daripada menentukan hasil-hasil tertentu" (Keddell 1993: 4) Sebaliknya,

penelitian ini berpendapat bahwa opini publik memang memiliki pengaruh penting terhadap kebijakan luar negeri. Opini publik berperan sebagai pembatas yang krusial terhadap kebijakan. Hal ini tidak berarti bahwa para petinggi dan pemerintah negara tidak mempengaruhi sikap publik tentang kebijakan luar negeri (Midford, 2006: 8).

Pengaruh petinggi atas opini publik akan terjadi secara bertahap. Pemerintah Jepang secara bertahap menunjukkan kepada publik kapasitas negaranya yang berhasil mengendalikan dan mengelola berbagai kegiatan militer yang lebih besar dan lebih kuat tanpa harus mengalami pengembalian masa ke zaman militerisme tahun 1930-an, di mana kontrol sipil dan demokrasi runtuh. Strategi ini menyebabkan perluasan peran militer Jepang selangkah demi selangkah selama lebih dari lima puluh tahun. Dalam hal ini, opini publik telah terbukti sebagai kendala yang lunak dan agak mudah dibentuk, yang memperlambat perubahan kebijakan keamanan.

Anggaran dan Sumber Daya

Jepang bermaksud untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB pada tahun 2027, atau 60 persen selama lima tahun. Strategi keamanan nasional Jepang yang baru menjelaskan bagaimana Jepang akan mengambil tanggung jawab utama untuk pertahanannya sendiri dalam waktu lima tahun dan mengambil peran yang jauh lebih aktif dalam keamanan Indo-Pasifik. Akan tetapi, kemungkinan besar Jepang masih akan bergantung pada Amerika Serikat dalam banyak hal dan terbatas dalam kemampuannya untuk berkontribusi pada krisis regional apa pun hingga beberapa tahun kedepan (Kavanagh, 2023).

Amerika Serikat perlu terus menekan Jepang untuk tetap berpegang teguh dan bahkan memperluas investasi pertahanannya lebih lanjut, misalnya, dengan membuat bantuan militer Amerika Serikat ke Jepang bersyarat pada peningkatan yang berkelanjutan dan lebih besar dalam pengeluaran pertahanan Jepang di tahun-tahun mendatang. Jepang menghadapi kesenjangan investasi yang dalam, dan peningkatan anggaran yang direncanakan saat ini terlalu kecil dan bertahap untuk mengatasi konsekuensi terkait dalam waktu dekat. Selama tiga puluh tahun terakhir, Jepang telah mempertahankan anggaran pertahanan tahunan sekitar 1 persen dari PDB-nya. Ini di bawah patokan 2 persen NATO dan bahkan lebih jauh lagi dari rekan-rekan regional seperti Korea Selatan, India, dan Taiwan, yang masing-masing rata-rata sekitar 2,5 persen dari PDB per tahun selama periode yang sama. Pengeluaran yang rendah selama beberapa dekade telah meninggalkan pasukan pertahanan Jepang dengan infrastruktur fisik yang menua, persediaan amunisi yang rendah, kemampuan pengisian bahan bakar dan angkutan udara dan laut yang sudah tua dan tidak mencukupi, dan personel yang terlalu sedikit karena masalah perekrutan dan retensi (Kavanagh, 2023).

Menutup kesenjangan investasi ini akan sulit dan membutuhkan waktu. Sebagai contoh, selisih antara Jepang yang mengalokasikan 1 persen dari PDB untuk pertahanan

dan 2 persen dari tahun 2012-2021 berarti pengeluaran yang hilang sekitar 500 miliar dolar AS. Untuk mengisi kesenjangan ini dalam lima tahun ke depan, Jepang perlu menginvestasikan tambahan 2 persen dari PDB di atas kenaikan yang direncanakan hanya untuk mengimbangi kekurangan pengeluaran selama satu dekade. Peningkatan sebesar ini kemungkinan tidak akan berkelanjutan secara politis, tetapi perbandingan ini menyoroti betapa mendalam dan jangka panjangnya dampak dari rendahnya pengeluaran pertahanan Jepang. Ketika mengatasi kekurangan karena kurangnya anggaran, Jepang juga perlu membangun atau memperoleh seperangkat sistem, persenjataan, dan infrastruktur yang dimodernisasi dan canggih dan mahal yang diperlukan untuk pertahanan diri terhadap musuh (Kavanagh, 2023).

SIMPULAN

Japan Self-Defense Force (JSDF) memiliki beberapa tugas utama, termasuk operasi bantuan bencana, operasi pemeliharaan perdamaian internasional, perlindungan sipil, dan pertahanan nasional. Dalam hal operasi bantuan bencana, JSDF memainkan peran penting dalam melindungi nyawa dan harta benda selama bencana domestik seperti gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, dan insiden terkait salju. Mereka terlibat dalam misi pencarian dan penyelamatan, memberikan bantuan medis, mengendalikan banjir, mencegah epidemi, memasok air, serta mengangkut personel dan persediaan. Keterlibatan JSDF diberi wewenang oleh Menteri Pertahanan untuk melindungi nyawa dan aset dalam menghadapi bencana alam.

Untuk operasi pemeliharaan perdamaian internasional, JSDF secara aktif berpartisipasi dalam operasi perdamaian global, bantuan kemanusiaan setelah bencana berskala besar, dan dukungan rekonstruksi. Mereka berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau melalui kerja sama bilateral.

Perlindungan sipil adalah tugas penting lainnya bagi JSDF. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi warga sipil dalam situasi darurat atau selama serangan bersenjata. Hal ini termasuk mengambil tindakan untuk pertahanan sipil, mengevakuasi orang, dan menyediakan tempat berlindung.

Terakhir, JSDF dipercayakan dengan pertahanan Jepang. Mereka mempertahankan dan meningkatkan keamanan nasional negara dengan memastikan kesiapan angkatan bersenjata, melakukan latihan militer secara teratur, dan meningkatkan kemampuan di berbagai bidang seperti pertahanan udara, pertahanan rudal, dan keamanan siber. Tujuan utamanya adalah untuk melawan potensi ancaman militer dan menjaga pertahanan Jepang di tengah-tengah tantangan keamanan global yang terus berkembang.

Melalui tugas-tugas ini, JSDF memenuhi perannya dalam menjaga keamanan Jepang, berkontribusi pada perdamaian internasional, dan melindungi warga sipil pada

saat keadaan darurat. Komitmen pasukan ini terhadap bantuan bencana, operasi pemeliharaan perdamaian, perlindungan sipil, dan pertahanan nasional menunjukkan dedikasinya dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasukan bela diri sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan.

JSDF juga menghadapi beberapa tantangan yang membutuhkan perhatian dan manajemen yang cermat. Salah satu tantangan signifikan bagi JSDF adalah batasan konstitusional yang diberlakukan oleh Pasal 9 Konstitusi Jepang. Pasal ini membatasi kemampuan militer Jepang dan melarang penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa internasional. Interpretasi dan potensi revisi Pasal 9 masih menjadi isu yang diperdebatkan, dengan perdebatan seputar kemampuan Jepang untuk merespons secara efektif terhadap ancaman keamanan yang terus berkembang sembari menjunjung tinggi komitmennya terhadap perdamaian dan non-agresi.

Tantangan lain adalah kendala keuangan dan sumber daya yang dihadapi oleh JSDF. Meskipun ekonomi Jepang kuat, keterbatasan anggaran pertahanan dan prioritas pengeluaran publik yang bersaing telah berdampak pada upaya modernisasi dan kesiapan operasional JSDF. Menyeimbangkan kebutuhan pendanaan pertahanan yang memadai dengan prioritas nasional lainnya membutuhkan alokasi sumber daya yang cermat dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien.

JSDF juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia. Memastikan tenaga kerja yang terampil dan memadai sangat penting untuk menjaga kesiapan operasional. Mengatasi kekurangan personil, meningkatkan strategi rekrutmen dan retensi, serta memberikan pelatihan berkelanjutan dan kesempatan pengembangan profesional merupakan pertimbangan utama bagi JSDF.

Selain itu, JSDF menghadapi kemajuan teknologi di ranah militer. Perkembangan pesat di berbagai bidang seperti perang siber, pertahanan rudal balistik, dan sistem tanpa awak memerlukan adaptasi dan modernisasi berkelanjutan. Memperoleh teknologi militer canggih dan membina kerja sama dengan mitra internasional sangat penting bagi JSDF untuk mengimbangi ancaman keamanan yang terus berkembang.

Terlepas dari tantangan ini, JSDF tetap berkomitmen pada tugas utamanya, yang mencakup operasi bantuan bencana, upaya pemeliharaan perdamaian internasional, perlindungan sipil, dan pertahanan nasional. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui perencanaan strategis, manajemen sumber daya, dan adaptasi yang berkelanjutan, JSDF dapat meningkatkan kemampuannya dan secara efektif memenuhi tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2015, October 15). Toothless tiger: Japan Self-Defence Forces. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-34485966>
- Ginanjar, S. M., Agus, M., & Leli, Y. (2017). Kaisar Amerika Di Negeri Sakura : Peranan Douglas Macarthur Dalam Rekonstruksi Jepang Pasca Perang Dunia II. *Factum*, 217-229.
- Japan Ministry of Defense. (2015, April 27). The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation. Retrieved from Ministry of Defense: https://web.archive.org/web/20190608153455/https://www.mod.go.jp/e/d_act/ampo/shishin_20150427e.html
- Japan Ministry of Defense. (n.d.). National Defense Program Guidelines (NDPG) and Medium Term Defense Program (MTDP). Retrieved from Ministry of Defense: https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/guideline/index.html
- JGSDF. (n.d.). Civil Protection. Retrieved from Ministry of Defense: <https://www.mod.go.jp/gsdf/english/civil/index.html>
- JGSDF. (n.d.). Disaster Relief Operation. Retrieved from Ministry of Defense: <https://www.mod.go.jp/gsdf/english/dro/index.html>
- JGSDF. (n.d.). International peace cooperation operation. Retrieved from Ministry of Defense: <https://www.mod.go.jp/gsdf/english/pko/index.html>
- Kavanagh, J. (2023, February 8). Japan's New Defense Budget Is Still Not Enough. Retrieved from Carnegie Endowment: <https://carnegieendowment.org/2023/02/08/japan-s-new-defense-budget-is-still-not-enough-pub-88981>
- Kowalski, F. (2014). *An Inoffensive Rearmament: The Making of the Postwar Japanese Army*. Naval Institute Press, 72.
- Lendon, B. (2016, December 7). Resurgent Japan military 'can stand toe to toe with anybody'. Retrieved from CNN: <https://web.archive.org/web/20181204084031/https://edition.cnn.com/2016/12/06/asia/japan-military-pearl-harbor-anniversary/>
- Maheswara, I., Susanti, S., & Fasisaka, I. (2020). Program Peningkatan Militer Jepang di kawasan Asia Pasifik melalui NDPG (National Defense Program Guideline) pasca masuknya dukungan dari AS. *Dikshi*, 1-11.
- Mardialina, M. (2013). Kontroversi Amandemen Konstitusi Jepang. *Interdependence Journal of International Studies*, 203-221.
- Midford, P. (2006). *Japanese Public Opinion and the War on Terrorism: Implications for Japan's Security Strategy*. United States: Palgrave Macmillan US.
- Mohammed, A. (2015, April 28). U.S., Japan unveil new defense guidelines for global Japanese role. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-usa-japan-defense-idUSKBN0NI08O20150428>
- Ruriko, K. (2007). The US Occupation and Japan's New Democracy. *Educational Perspectives*, 36-43.